

---

## ANALISIS PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Sepria Dona<sup>1</sup>, Elfina Yenti SE., Ak., M.Si, CA<sup>2</sup>

Akuntansi Syariah, FEBI IAIN Batusangkar

Email: [sepriadona07@gmail.com](mailto:sepriadona07@gmail.com),<sup>1</sup> [elfinayenti@iainbatusangkar.ac.id](mailto:elfinayenti@iainbatusangkar.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Permasalahan dari penelitian ini adalah penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya pada badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten solok selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten Solok Selatan; penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Solok Selatan. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dan subyek penelitian ini adalah Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap subyek penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) bendahara penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah menerapkan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku, dari tahap awal pengumpulan bukti-bukti transaksi sampai pada tahap pengesahan dan penyampaian kepada pihak-pihak terkait; (2) bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah menerapkan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman yang berlaku dari tahap pembukuan belanja hingga uraian prosedur keseluruhan penyampaian pertanggungjawaban.

**Kata Kunci:** Penatausahaan; Penyusunan; Laporan Pertanggungjawaban; Bendahara

### ABSTRACT

*The problem of this research is how the administration and preparation of the Treasurer's Accountability Report and its submission to the Regional Financial Management Agency of South Solok Regency. The purpose of this study was to determine: Administration and preparation of the Accountability Report of the Revenue Treasurer at the Regional Financial Management Agency of South Solok Regency; Administration and preparation of the Expenditure Treasurer accountability report at the Regional Financial Management Agency of South Solok Regency. The research method used is descriptive qualitative and the subject of this research is the Revenue Treasurer and the Expenditure Treasurer of the Regional Financial Management Agency of South Solok Regency. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation of research subjects. While the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) the receipt treasurer of the Regional Financial Management Agency of South Solok Regency has implemented administration and preparation of accountability reports in accordance with applicable guidelines, from the initial stage of collecting transaction evidence to the stage of ratification and submission to related parties. ; (2) the expenditure treasurer of the Regional Financial Management Agency of South Solok Regency has implemented the administration and preparation of the accountability report in accordance with the applicable guidelines from the expenditure accounting stage to the description of the overall procedure for delivering accountability.*

**Keywords:** Administration, Preparation, Accountability Report, Treasurer.

### PENDAHULUAN

Lahirnya era baru pelaksanaan pemerintah menjadikan adanya serangkaian perubahan dramatis. Sebuah keniscayaan yang tidak ideal dari kelahiran otonomi daerah ini adalah mencuatnya eksistensi

persoalan-persoalan pengelolaan keuangan negara yang bertendensi lebih masif dan juga terdesentralisasi. Di zaman 32 tahun orde baru, pada saat penyelenggaraan pemerintah dijalankan tersentralisasi, persoalan penyalahgunaan keuangan negara memusat di pemerintah pusat beserta seluruh BUMN-nya.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan partisipasi dengan aturan kebebasan yang sebesar-besarnya dalam struktur dan pedoman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil dari kemandirian daerah kabupaten seharusnya melakukan administrasi keuangan daerah secara tepat. Administrasi keuangan daerah adalah tindakan umum yang meliputi penataan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian tanggung jawab, dan pengelolaan dana daerah. Pemegang kekuatan administrasi keuangan daerah adalah kepala daerah yang dalam kedudukannya mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan administrasi umum uang daerah.

Pelaksanaan pemerintah terhadap rencana pengeluaran sangat penting dalam menyelesaikan interaksi perbaikan yang telah diatur oleh otoritas publik dalam mengerjakan bantuan pemerintah daerah. Hal ini secara tegas diidentikkan dengan pemanggilan pemodal yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkewajiban untuk mendapatkan, mencatat, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang dagangan serta berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada Kepala Lokal atau Perantara Klien. Rencana keuangan. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 telah memberikan pedoman-pedoman tentang Penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara keuangan dan penyampaiannya.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yang ada di Kabupaten Solok Selatan ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki penatausahaan serta laporan pertanggungjawabannya 2 (dua) jenis, yaitu penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan. Untuk mengetahui penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Akuntansi**

Hutagaol (2012:57-58) mendefinisikan akuntansi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing ahli yang memberikan defenisi atas akuntansi. Secara umum akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kwantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomis. Pengertian ini menekankan pada peranan akuntansi, yaitu untuk memberikan informasi bagi kepentingan para pemakai daftar keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi tersebut merupakan akuntansi oleh *Financial Accounting Standard Board* (FASB).

### **Akuntansi Sektor Publik**

Handayani (2019:2-3) mendefinisikan sektor publik sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa untuk memehuni kebutuhan dan hak public”. Sector public disebut bidang yang membicarakan metode manajemen Negara. Akuntansi sector public

memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Tugas dan tanggungjawab akuntan sector publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal maupun kebutuhan pihak eksternal.

### **Jenis-Jenis Dan Standar Akuntansi Sektor Publik**

Bolendea (2017:1103-1104) menyatakan bahwa di bidang pendidikan dan kesehatan, juga mendapati beragam organisasi sektor publik, seperti Universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas atau balai-balai kesehatan. Yang juga termasuk organisasi sektor publik adalah partai-partai dan LSM-LSM di berbagai bidang. Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sector publik di atas dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Instansi Pemerintah
- 2) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah
- 3) Organisasi Nirlaba Milik Swasta

### **Sistem Akuntansi Pemerintahan**

Budiantara (2015: 22) mendefinisikan standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Zamzani (2014:16) menyatakan bahwa perubahan standar akuntansi pemerintah membuat auditor internal pemerintah ataupun auditor eksternal juga harus mengevaluasi sejauh mana penerapan yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan di lingkungan pemerintah lembaga kementerian.

### **Laporan Keuangan**

Kesuma (2014:94) mendefinisikan Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan keuangan lainnya.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Pangalila (2016:236) menyatakan Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PMK PP 71 Tahun 2010 pasal 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

### **Akuntansi Keuangan Daerah**

Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah dicirikan sebagai segala hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang, termasuk segala jenis kekayaan yang diidentikkan dengan hak dan kewajiban daerah

### **Basis Akuntansi Keuangan Daerah**

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 maka mulai tahun 2015 pemerintah daerah perlu memakai basis akrual. Basis akrual adalah basis pembukuan yang merasakan dampak pertukaran dan berbagai kesempatan ketika itu terjadi, tidak terlalu memikirkan kapan uang atau uang timbal balik diperoleh atau dibayarkan.

### **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Pembukuan keuangan daerah merupakan suatu proses pengenalan, pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan keuangan dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Mengingat pengaturan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pembukuan Keuangan Daerah, pemerintah daerah setempat wajib membina kerangka pembukuan pemerintah daerah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

### **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

Rahmatiah (2016:746) menyatakan bahwa perangkat dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara lebih rinci tertuang dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan mengacu pada Pedoman/Pengumuman Kepala Daerah. Dalam struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah harus menyusun rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawab pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pelaksanaan APBD, serta dilengkapi dengan laporan presentasi pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan garis besar ikhtisar anggaran BUMD/Organisasi Daerah.

### **Penatausahaan dan Laporan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Keuangan Daerah**

Raharja (2016:113) mendefinisikan Pengelolaan keuangan daerah meliputi: Perencanaan: pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah yang memerlukan adanya koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan antar daerah. Pelaksanaan: larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban untuk melaksanakan APBD yang di dasarkan pada prinsip hemat, efektif dan efisien. Pelaporan: laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan. Pertanggungjawaban: bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan atau tambah uang persediaan terhadap penggunaan anggaran.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu bersifat deskriptif kualitatif. Subandi (2011:176) menyatakan bahwa deskriptif kualitatif adalah teknik eksplorasi yang menghasilkan informasi ekspresif berupa kata-kata yang disusun atau diungkapkan atau dari jenis kegiatan strategi. Metodologi yang digunakan bersifat subjektif yang memiliki kualitas menarik. Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini dimulai dari bulan 1 Juli sampai 2021 sampai 10 Juli 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, observasi merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengamati suatu kejadian. Metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif.

Dalam model ini terdapat tiga bagian yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan pencapaian kesimpulan atau konfirmasi.

## **HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya Renja OPD menjelaskan mengenai tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tugas pokok dan fungsi OPD serta mengakomodasikan hasil musrenbang dan Forum OPD.

Dalam melakukan proses penatausahaan oleh bendahara penerimaan khususnya di bidang Pendapatan, melengkapi rangkaian siklus mendapatkan, menyimpan, menyetor, mengawasi, dan mewakili kas daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di SKPD. Laporan-laporan yang digunakan oleh bendahara yaitu: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu per Rincian Objek Penerimaan, Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian (RPH), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Tanda Bukti Pembayaran serta bukti penerimaan lainnya yang sah. Kemudian, pada saat itu, penerimaan ini dicatat dalam buku penerimaan dan penyimpanan dan setelah itu menyelesaikan buku register STS.

Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, bendahara penerimaan akan mempertanggungjawabkan laporan dalam 2 bentuk laporan yaitu laporan pertanggungjawaban administratif dan laporan pertanggungjawaban yang fungsional. Adapun hal mengenai laporan tersebut ada rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada pada bendahara penerimaan. Laporan ini di lampiri dengan buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan, buku register STS, bukti penerimaan yang sah dan lengkap, serta laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu. Penyampaiannya dilakukan pada akhir bulan.

Khususnya Pejabat Pemakai Keuangan, menyelesaikan serangkaian siklus kegiatan untuk menerima, menyimpan, membayar, mengontrol, dan mencatat uang tunai untuk pemakaian dalam rangka pelaksanaan APBD di SKPD. pejabat keuangan menggunakan dalam hal-hal, misalnya, pengajuan surat permintaan pembayaran UP/GU/TU, pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU, pembukuan penggunaan kas persediaan, pembukuan pertanggungjawaban uang panjar, serta pembukuan pertanggungjawaban penambahan uang. Catatan yang digunakan adalah duplikat SPD, draft surat pernyataan penggunaan uang, SP2D, LPJ untuk penggunaan UP/TU, bukti melakukan transaksi, dan laporan lainnya. Dimana pencatatan ini dilakukan pada BKU dan buku pembantu.

Dalam membuat laporan pertanggungjawaban, bendahara keuangan bagian pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional yang didalamnya memuat rekapitulasi saldo kas pada bendahara pengeluaran. Kemudian, Laporan ini digabungkan dengan BKU, laporan penutupan kas, dan laporan pertanggungjawaban dari Bendahara bagian pembantu. Selanjutnya bendahara bagian pengeluaran juga membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan UP dan penggunaan TU dengan mengumpulkan bukti penggunaan UP/TU. Jadi laporan pertanggungjawaban administratif dan laporan pertanggungjawaban fungsional serta penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah sesuai pedoman yang relevan.

Dalam pengendalian tanggung jawab pejabat keuangan pendapatan, hal ini masih mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun hampir sama dengan itu juga disesuaikan dengan berbagai undang-undang lainnya, mengingat pedoman yang dibuat saling berkaitan. Selanjutnya adalah penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara keuangan atas penerimaan dan pemasukan yang diatur dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Penatausahaan tersebut adalah Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban. Penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah sesuai pedoman yang relevan.

Penelitian yang dilakukan pada BPKD Kabupaten Solok Selatan didukung dengan penelitian sebelumnya, dengan hasil penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya sesuai pedoman yang relevan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Bendahara penerimaan badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten solok selatan telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Bendahara pengeluaran badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten solok selatan telah melaksanakan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hutagaol, R. M. (2012). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol. 1 No.2* , 57-58.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: POLIBAN PRESS.
- Bolendea, F. K. (2017). Analisis Penggunaan dan Penatausahaan arang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Volume 12, Nomor 2* , 1103-1104.
- Budiantara, N. d. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis Vol. 12 No.1* , 22.
- Kesuma, R. &. (2014). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 5 No. 1* , 94-95.
- Billy Rivaldy pangalila, d. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 Nomor 04* , 236.
- Rahmatiah, D. R. (2016). Analisis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1* , 746.
- Raharja, Dkk (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Aset Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, 113*